

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

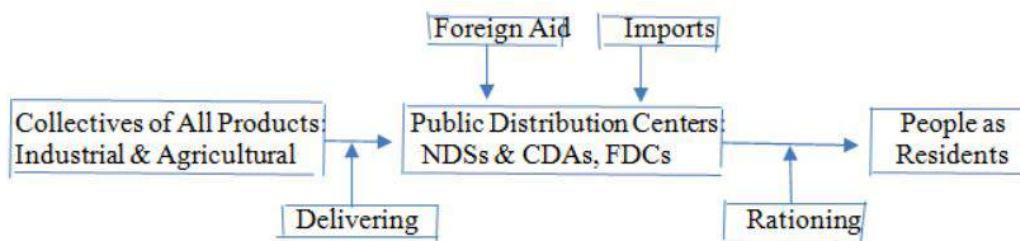
Penerapan ekonomi sosialis di Korea Utara melalui ideologi *Juche*, menyebabkan kegiatan pasar, perdagangan bebas, hingga perdagangan antar-pribadi menjadi kegiatan yang dilarang oleh pemerintah (Flack-Bilden, 2019: 44). Seluruh sektor industri berada di bawah kontrol penuh negara dan harus memenuhi kuota produksi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat¹. Sebagai gantinya, seluruh penduduk harus bergantung sepenuhnya pada *Public Distribution System* (PDS) untuk mendapatkan jatah bulanan kebutuhan hidup, seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan pokok lainnya (Flack-Bilden, 2019: 44). Selama sistem PDS berlangsung, Korea Utara hanya mengakui tiga struktur perdagangan, yakni *National Distribution System* (NDS), *Cooperative Distribution Association* (CDA), dan *Farmers Distribution Commerce* (FDC) (Choe, 2015: 64).

NDS merupakan jaringan distribusi tertinggi yang menguasai lebih dari 60 persen produk dalam negeri yang diproduksi secara grosir dan terpusat dari jaringan setiap

¹ Pada tahun 1958, hampir semua sektor ekonomi Korea Utara telah mengalami transisi sosialis. Dengan kata lain, sektor pertanian telah dilakukan secara kolektif ke dalam bentuk komune dan industri ditempatkan di wilayah publik, bukan pribadi. Di sektor industri, transisi sosialis menyebabkan otoritas tertinggi berada di tangan komite partai yang mengawasi pabrik sesuai dengan pedoman ideologi pusat, sedangkan manajer pabrik hanya bertugas untuk mengimplementasikan rencana produksi dan pencapaian kuota yang diatur pemerintah (Flack-Bilden, 2019: 44-45).

lokasi unit produksi regional (Choe, 2015: 64). NDS memiliki kendali penuh atas jumlah dan jenis barang yang akan diproduksi di bawah rencana ekonomi nasional. Di sisi lain, CDA merupakan asosiasi perdagangan regional yang bekerja sama dengan NDS dan menguasai setidaknya 40 persen dari distribusi ritel nasional. Elemen utama dari CDA adalah produsen pertanian, namun sektor perikanan dan perdagangan lainnya juga turut menjadi bagian dari asosiasi ini. Sedangkan FDC adalah sistem distribusi terkecil, di mana anggota individu dapat saling bertukar produk lebih mereka setelah memenuhi jumlah kuota pemerintah. Sistemika distribusi dari ketiga struktur tersebut dapat dilihat melalui Gambar 1 yang menunjukkan bahwa seluruh jenis produk dikumpulkan dari produsen melalui tiga struktur yang kemudian didistribusikan dengan sitem penjatahan kepada seluruh masyarakat. Dengan kata lain, tidak boleh ada pasar privat di Korea Utara, sehingga penduduk hanya berperan sebagai penerima produk dengan pilihan terbatas, bukan konsumen layaknya sistem pasar yang kita kenal (Choe, 2015: 64).

Gambar 1.1 Saluran Sistem Distribusi Korea Utara



(Choe, 2015: 64)

Akan tetapi, masalah ekonomi yang mulai terjadi di Korea Utara sejak akhir 1980-an dan berujung pada bencana kelaparan nasional pada tahun 1990-an, telah menyebabkan pemerintah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidup masyarakat melalui PDS². Bencana yang menyebabkan sekitar dua juta penduduk kelaparan dan sekitar satu juta orang meninggal dunia tersebut akhirnya membawa fenomena baru bagi sistem ekonomi Korea Utara, yakni mulai tumbuhnya bibit marketisasi melalui aktivitas perdagangan privat antar masyarakat yang dikenal dengan istilah *jangmadang* yang berarti lahan pasar (Kim, 2018: 19).

Melalui *jangmadang*, masyarakat menjual produk apapun yang mereka miliki untuk bertahan hidup, seperti produk pertanian rumahan, olahan makanan, hingga membeli atau menjual barang dari selundupan perdagangan gelap di wilayah perbatasan Korea Utara dengan Tiongkok. Untuk pertama kalinya, *jangmadang* telah memperkenalkan konsep baru tentang keuntungan dan konsumerisme kepada masyarakat Korea Utara (Reiss, 2021). Aktivitas semacam ini memang merupakan tindakan yang ilegal dan menyalahi aturan dalam ekonomi sosialis Korea Utara. Namun dengan desakan situasi yang terjadi, pemerintah tidak punya pilihan lain selain membiarkan sistem *jangmadang* terus beroperasi hingga saat ini (Reiss, 2021).

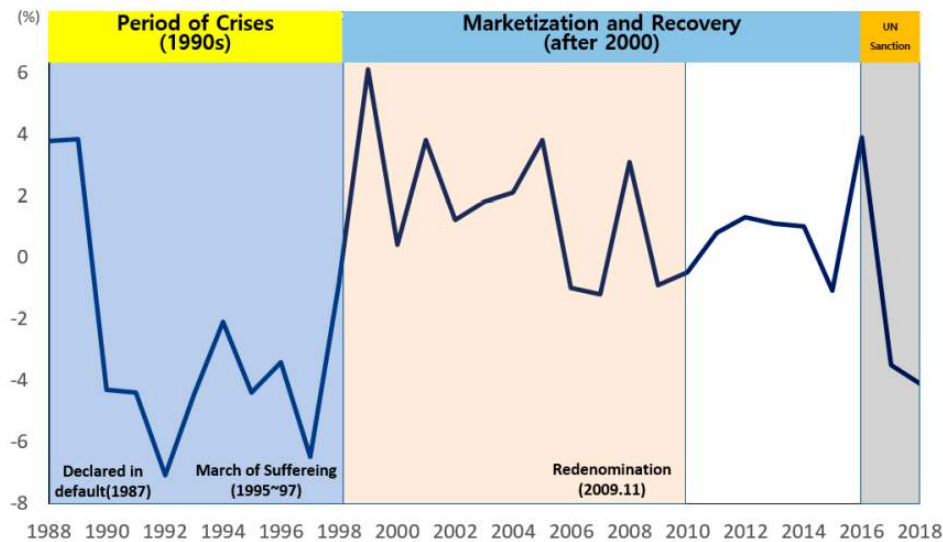
² Permasalahan ekonomi tersebut terjadi karena adanya beberapa faktor, seperti mulai berkurangnya dukungan Uni Soviet, lemahnya pertumbuhan ekonomi – dari 10,5% pada tahun 1970 menjadi 2,1% pada 1980, pengeluaran militer yang berlebihan – hampir seperempat dari GNP negara, bencana banjir dan kekeringan, dan lain sebagainya (Kim, 2018: 19 dan Flack-Bilden, 2019: 65).

Di era Kim Jong-un, *jangmadang* telah memegang peran utama dalam kehidupan ekonomi Korea Utara, meskipun marketisasi belum dilegalkan secara konstitusional dan bahkan tidak pernah dicantumkan dalam laporan tahunan Kongres di Korea Utara (Arirang News, 2017). Diperkirakan, tiga perempat dari populasi Korea Utara telah bergantung pada sistem *jangmadang* untuk kelangsungan hidup mereka – populasi Korea Utara saat ini sekitar 25,6 juta orang. Tidak hanya itu, 90% dari pengeluaran rumah tangga juga diperuntukkan untuk operasional di *jangmadang*, dengan pendapatan pedagang rata-rata mencapai 80 kali lebih besar dari gaji bulanan resmi di sektor ekonomi formal negara. Saat ini, tidak ada barang yang tidak dapat ditemukan di *jangmadang*, mulai dari kebutuhan pangan, pakaian, alat elektronik, kosmetik, hingga media asing ilegal juga dapat dibeli di *jangmadang* (Reiss, 2021).

Menurut Choe (2015: 66), *jangmadang* merupakan fenomena yang masih berada dalam proses evolusi, sehingga strukturnya terus mengalami perkembangan dengan masuknya berbagai ide dan jenis bisnis baru. Namun yang pasti, pasar informal ini telah membantu masyarakat untuk bertahan hidup di tengah buruknya kondisi ekonomi yang terus dialami oleh Korea Utara, terutama di tengah sanksi perdagangan internasional yang diberikan oleh PBB sejak tahun 2016, yang membuat ekonomi Korea Utara mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2017 dan 2018 sebesar -3,5% dan -4,1%³ (Setiaji, 2020).

³ Sanksi yang diberikan oleh PBB merupakan bentuk respons kecaman terhadap berbagai uji coba nuklir Korea Utara. Sanksi tersebut di antaranya berasal dari Resolusi PBB 2270, 2321, 2371, 2375, dan

Grafik 1.1 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Korea Utara



(Kim et. al., 2020: 9)

Walaupun demikian, perkembangan *jangmadang* di era Kim Jong-un ternyata juga membawa sisi negatif bagi ketahanan rezim dengan munculnya generasi *jangmadang*, yakni generasi muda Korea Utara yang sejak kecil atau lahir telah familiar dengan keberadaan aktivitas *jangmadang* dan tidak turut merasakan peran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat melalui PDS (Baek, 2019). Generasi ini digambarkan memiliki tiga karakteristik utama, yakni: (1) bersifat kapitalis, individualis, dan berani mengambil risiko untuk memenuhi kebutuhan hidupnya; (2) memiliki akses besar terhadap informasi dan media asing; dan (3) memiliki loyalitas

2397 yang melarang kegiatan ekspor komoditi utama Korea Utara, seperti batu bara, baja, biji besi, dan produk perikanan. Bahkan, Resolusi 2397 menambahkan berbagai item, seperti barang elektronik, hasil pertanian, kayu, dan kapal ke dalam larangan ekspor tersebut (Setiaji, 2020).

yang rendah terhadap rezim dan pemimpin Korea Utara. Menurut *Liberty in North Korea* (2019), generasi *jangmadang* merupakan generasi dengan potensi terbesar yang dapat mendorong terjadinya perubahan besar bagi Korea Utara, yang mampu membongkar propaganda rezim dan membawa Korea Utara menjadi suatu negara ‘baru’.

Dalam konteks ini, pemerintah Korea Utara telah menyadari dampak negatif yang ditimbulkan dari generasi *jangmadang* terhadap rezim pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Kim Jong-un pada bulan April 2021 yang mengatakan bahwa budaya kaum muda adalah masalah kritis yang tidak dapat diabaikan lagi, karena nasib partai, revolusi, negara dan rakyat ikut dipertaruhkan di dalamnya (Ja-young, 2021). Itulah mengapa, pemerintah Korea Utara telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang ditujukan untuk meminimalisir dampak yang dihasilkan dari kemunculan generasi *jangmadang* tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimanakah implikasi generasi *jangmadang* terhadap ketahanan rezim Kim Jong-un di Korea Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis implikasi dari generasi *jangmadang* terhadap ketahanan rezim Kim Jong-un di Korea Utara. Selain itu, penelitian juga berupaya untuk menemukan mekanisme *survival* rezim Kim Jong-un

yang dibentuk untuk menghadapi generasi *jangmadang* di tengah pentingnya peran *jangmadang* bagi kehidupan ekonomi Korea Utara saat ini.

1.4 Kerangka Teori

1.4.1 Konsep Ketahanan Rezim

Rezim dapat didefinisikan sebagai suatu lembaga dengan batasan substantif dan geografis, yang terikat oleh suatu aturan eksplisit dan telah disepakati oleh pemerintah yang berdaulat (Ward, 2016). Dalam penjelasan yang lebih rinci, definisi rezim juga melibatkan dokumentasi pembentukan suatu lembaga yang menekankan pada prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan di mana harapan dari masing-masing pelaku (biasanya pemerintah) bertemu dan dilembagakan. Penggunaan konsep rezim juga sering kali melibatkan asosiasi dengan individu tertentu (misalnya, rezim Nicolae Ceaușescu di Rumania), ideologi (misalnya, rezim fasis), pendekatan (misalnya, rezim militer), atau proyek politik (misalnya, rezim neoliberal) (Ward, 2016). Dalam konteks ini, *regime resilience* atau konsep ketahanan rezim kemudian dapat didefinisikan sebagai kemampuan suatu rezim atau tatanan pemerintah yang berkuasa untuk mengatasi dan melakukan re-organisasi ketika suatu perubahan ataupun ancaman sedang terjadi, sehingga pemerintahan tersebut tetap dapat mempertahankan fungsi dasar, struktur dan identitas yang dimiliki (Walker et. al., 2004, dalam Kinzig et. al., 2006).

Dalam hal ini, Tomsa (2017: 4) menjelaskan bahwa tingkat ketahanan rezim yang dibentuk oleh pemerintahan baru, dapat dipengaruhi oleh hubungan presiden atau pemimpin dengan pemegang rezim sebelumnya. Ketika presiden baru datang sebagai lawan dari rezim sebelumnya yang bersifat *vulnerable* – kondisi di mana rezim tersebut telah kehilangan legitimasi akibat kegagalannya dalam mengatasi masalah yang dihadapi negara, maka presiden tersebut akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk membentuk rezim yang kuat, sesuai dengan visi yang ia miliki. Sebaliknya, ketika presiden baru datang sebagai afiliasi dari rezim *vulnerable* sebelumnya, maka ia akan kesulitan untuk membentuk rezim yang kuat karena posisi dilemanya dalam memilih antara merevitalisasi pilar rezim yang telah didiskreditkan oleh masyarakat atau menjauhkan diri dari rezim tersebut – terlepas dari hubungan afiliasi mereka, di mana upaya ini akan menimbulkan permasalahan baru terkait kredibilitas presiden dan rezim-nya yang akan selalu dipertanyakan (Tomsa, 2017: 4).

Di sisi lain, ketika rezim pemerintah tidak mampu mempertahankan kemampuannya sesuai dengan konsep ketahanan rezim, maka rezim tersebut akan menghadapi suatu fenomena yang dikenal sebagai *regime shift* atau pergantian rezim. Menurut Cumming dan Collier (2005, dalam Kinzig et. al., 2006), pergantian rezim menggambarkan hilangnya kemampuan rezim yang menyebabkan fungsi, struktur, dan identitas rezim berganti ke versi atau bentuk yang baru. Di samping itu, Kinzig et. al. (2006) menambahkan bahwa pergantian rezim merupakan hal yang sangat mungkin untuk terjadi, karena pada dasarnya negara yang tampak stabil, baik kondisi

alam, politik, ataupun masyarakatnya, dapat tiba-tiba bergeser dan berubah menjadi sesuatu yang baru dengan pengendalian internal dan karakteristik agregat yang sangat berbeda dari kondisi rezim sebelumnya. Selain itu, Cai (2008: 429) menambahkan bahwa gangguan terhadap ketahanan rezim juga dapat terjadi ketika masyarakat di negara tersebut lebih memilih untuk mengejar preferensi mereka terhadap suatu hal yang berbeda dengan apa yang sebenarnya diinginkan oleh rezim pemerintah. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa rezim pemerintah mulai kehilangan legitimasi dari masyarakat yang dapat berujung pada pelemahan atau bahkan pergantian rezim itu sendiri. Hal ini juga sekaligus menunjukkan bahwa legitimasi memiliki peran yang besar dalam mendukung terciptanya ketahanan rezim yang dilakukan oleh suatu pemerintah (Cai, 2008: 429).

1.4.2 Faktor Pendukung Ketahanan Rezim

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, legitimasi menjadi salah satu faktor penting bagi upaya ketahanan rezim yang dilakukan oleh suatu pemerintah. Peran legitimasi dalam upaya ketahanan rezim tersebut selaras dengan pendapat dari Kaplanova (2017: 18) yang menyatakan bahwa legitimasi merupakan kondisi dan esensi utama dari sistem politik yang berkaitan erat dengan isu kekuasaan, termasuk di dalamnya tentang rezim yang dibentuk oleh suatu pemerintahan. Sebelumnya, legitimasi sendiri dapat didefinisikan sebagai penerimaan populer terhadap pemerintah, rezim dan sistem pemerintahan (Blatter, 2018). Dalam konteks ini, legitimasi kemudian menjadi faktor penting bagi terwujudnya ketahanan rezim karena

mampu memberikan justifikasi kepada pemerintah untuk menjalankan kekuasaan dan fungsi yang mereka miliki. Hal ini dikarenakan, kebijakan dari pemerintah yang terlegitimasi akan dianggap valid dan bersifat mengikat bagi seluruh warga negara. Itulah mengapa, pemimpin akan memiliki ‘pembenaran’ dalam mempertahankan rezim pemerintahannya ketika suatu ancaman muncul akibat ketidaksetujuan ataupun perlawanan yang ditujukan terhadap rezim pemerintah tersebut (Bekkers & Edwards, 2007: 48).

Menurut Weber (dalam Kaplanova, 2017: 18), sumber dari legitimasi yang didapat oleh struktur otoritas terbagi menjadi tiga, yakni legitimasi tradisional yang didapatkan melalui keturunan atau agama, legal-rasional yang didapatkan melalui aturan yang ditetapkan, dan karismatik yang didasarkan pada karakter karismatik individu, seperti kepahlawanan, prestasi keagamaan, dan lain sebagainya. Dari tiga sumber legitimasi tersebut, Kaplanova (2017: 18) menjelaskan bahwa pada dasarnya legitimasi telah berperan bagi justifikasi rezim dan otoritas politik di semua tipe rezim politik suatu negara, baik demokratis ataupun otoriter. Untuk mempertahankan legitimasi yang telah didapat tersebut, maka terdapat beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah di masing-masing negara.

Di negara demokratis, menjaga legitimasi dalam upaya ketahanan rezim dapat dilakukan melalui pengangkatan pemimpin melalui pemilu yang jujur dan adil, pengambilan kebijakan yang berorientasi kepada rakyat, melaksanakan nilai-nilai demokrasi, menjunjung nilai transparansi, dan lain sebagainya (Anon, t.t.).

Sedangkan di negara otoriter, menjaga ketahanan rezim melalui legitimasi dilakukan dengan menggunakan faktor ideologi, sejarah, identitas nasional, karisma, serta agama atau kepercayaan sebagai pembenaran dari kekuasaan itu sendiri (Mazepus, 2017: 307). Hal ini dikarenakan, berbagai *scholar* berpendapat bahwa legitimasi di negara otoriter sebenarnya merupakan suatu *oxymoron*⁴, karena penguasa akan menyusun ‘bentuk’ legitimasinya sendiri untuk melanggengkan kekuasaan yang dimiliki dengan didukung oleh penggunaan beberapa faktor tersebut (Lee, 2019: 4).

Di sisi lain, stabilitas ketahanan rezim yang terjadi di negara otoriter sebenarnya tidak hanya didukung oleh faktor legitimasi. Hal ini didukung oleh pendapat dari Lee (2019: 4) yang menjelaskan bahwa stabilitas rezim otoriter ditopang oleh adanya tiga pilar, yakni legitimasi, represi, dan kooptasi. Dalam konteks ini, Kauffman (2013) menjelaskan bahwa kooptasi merupakan upaya mempersatukan rakyat dengan mengamankan partisipasi mereka, di mana mereka diberi kesempatan untuk menjadi bagian dan mendapat keuntungan dari sistem pemerintahan. Hal ini akan membentuk tingkat solidaritas rakyat terhadap rezim penguasa dan memperkuat klaim terhadap kekuasaan tersebut. Sedangkan represi merupakan upaya yang dilakukan untuk menekan seluruh pendapat yang berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh rezim penguasa, di mana upaya ini dapat dilakukan secara kasar dan terbuka ataupun lembut dan tersembunyi (Kauffman, 2013). Meskipun didukung oleh beberapa faktor di atas,

⁴ Oksimoron adalah penempatan dua kata yang bersifat antonim dalam satu frasa yang sama (Haryanto, 2021).

suatu rezim tidak akan pernah lepas dari berbagai bentuk gangguan dan ancaman yang dapat membawa dampak bagi ketahanan rezim itu sendiri. Itulah mengapa, pemerintah dituntut untuk selalu tanggap dalam mengambil kebijakan yang efektif, agar ketahanan rezim dapat tetap terjaga dengan baik.

1.4.3 Upaya Melindungi Ketahanan Rezim

Mempertahankan ketahanan rezim dari berbagai bentuk ancaman⁵ harus dilakukan melalui pembentukan kebijakan yang tepat, melalui perhitungan risiko dan keuntungan yang ditimbulkan dari kebijakan itu sendiri (Cai, 2008: 414). Secara umum, kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam melindungi ketahanan rezim dapat berbentuk tindakan yang bersifat represif⁶ atau toleransi. Pemilihan bentuk tindakan kebijakan tersebut tidak terlepas dari tipe rezim politik yang dianut oleh suatu negara, di mana hal ini kemudian memengaruhi pertimbangan pemimpin dalam mengkalkulasikan kebijakan yang akan diambil untuk melindungi ketahanan rezim kekuasaannya (Cai, 2008: 412).

Di negara demokrasi, pemerintah akan lebih hati-hati saat mengambil kebijakan represif, karena dapat berpengaruh pada tekanan yang akan dihadapi dalam pemilu selanjutnya (Cai, 2008: 412). Itulah mengapa, rezim di negara demokrasi cenderung lebih ‘lunak’ dalam menoleransi jenis ancaman atau perlawanan tertentu dengan

⁵ Seperti gerakan perlawanan dari masyarakat, ancaman dari lawan politik, aksi kudeta, terorisme, intervensi asing, dan lain sebagainya.

⁶ Menekan, mengekang, menahan, atau menindas (KBBI, t.t.).

menggunakan campuran tindakan toleransi dan represi atau mungkin lebih banyak mengarah ke tindakan toleransi. Di sisi lain, pemimpin politik di rezim otoriter mungkin tidak memiliki beban terhadap ‘*image*’ di pemilu, namun mereka lebih sensitif terhadap gerakan ancaman perlawanan dari rakyat, karena dianggap menunjukkan adanya kelalaian dalam sistem pemerintah dan kontrol sosial, mengingat rakyat di bawah rezim otoriter yang sebenarnya tidak diberikan hak untuk melakukan perlawanan terhadap rezim dan negara (Cai, 2008: 412-413). Dalam konteks ini, tindakan represi lebih umum digunakan oleh pemerintah otoriter untuk menunjukkan kekuatan rezim dan kekuasaan negara. Walaupun demikian, pemerintah otoriter juga dapat memberikan kelonggaran atau toleransi tertentu terhadap bentuk ancaman kepada rezim, karena represi yang sangat kuat justru akan berdampak pada meningkatnya sekutu oposisi dan bentuk ancaman yang lebih efektif (Cai, 2008: 413).

Di samping itu, tindakan represif juga dapat memberikan ancaman bagi legitimasi rezim penguasa di negara otoriter (Cai, 2008: 413). Walaupun ketergantungan rezim otoriter terhadap legitimasi jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara demokrasi, namun mereka tetap memiliki keinginan untuk memperkuat legitimasinya, karena legitimasi yang tinggi akan mempermudah upaya penanganan krisis dan mengurangi biaya yang digunakan untuk memaksakan kontrol ketat terhadap masyarakat. Akan tetapi, rezim otoriter biasanya akan mengalami dilema dalam melakukan toleransi, karena toleransi yang tidak tepat juga akan membawa

dampak yang fatal bagi ketahanan rezim. Hal ini didukung oleh dua alasan yang diutarakan oleh Goldstone dan Tilly (dalam Cai, 2008: 413).

Pertama, perubahan kecil yang dilakukan oleh rezim dapat mengindikasikan adanya proses illegitimasi yang berujung pada tuntutan yang lebih besar untuk menghapus atau mentransformasi rezim. Kedua, toleransi dapat meningkatkan persepsi tentang kelemahan rezim yang membuka peluang lebih besar bagi ancaman terhadap rezim itu sendiri. Di sisi lain, Cai (2008: 413) menambahkan bahwa krisis ‘hidup atau mati’ yang dihadapi oleh rezim di negara otoriter memang tidak selalu disebabkan oleh gejolak sosial ataupun perlawanan dalam skala kecil. Namun, apabila hal tersebut tidak ditangani dengan baik, maka kehancuran rezim akan sangat mungkin untuk terjadi. Itulah mengapa, keseimbangan antara represi dan toleransi merupakan masalah serius yang harus diselesaikan dengan baik oleh rezim pemerintah otoriter dalam upaya penanggulangan ancaman yang dapat membahayakan ketahanan rezim (Cai, 2008: 414).

1.5 Argumentasi Penelitian

Dari kerangka teori di atas, penulis berpendapat bahwa generasi *jangmadang* telah berimplikasi terhadap munculnya isu legitimasi bagi ketahanan rezim Kim Jong-un. Hal ini disebabkan oleh pengaruh aktivitas kapitalis dan konsumsi informasi ataupun media asing yang mereka lakukan, yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam ideologi *Juche*, sumber legitimasi rezim Kim Jong-un di Korea Utara.

1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Definisi dan Operasionalisasi Konsep

1.6.1.1 Generasi Jangmadang

Menurut Yeonmi (2017), generasi *jangmadang* merupakan generasi muda Korea Utara yang tumbuh seiring dengan perkembangan sektor ekonomi informal *jangmadang*. Hal ini kemudian diperkuat dengan pendapat dari Baek (2016: 183) yang menjelaskan bahwa generasi *jangmadang* merupakan masyarakat Korea Utara yang lahir di tengah atau setelah bencana kelaparan 1990-an dan bergantung pada aktivitas pasar – *jangmadang*. Generasi ini berusia 35 tahun atau lebih muda dan mencakup sekitar seperempat dari populasi penduduk Korea Utara⁷ – populasi Korea Utara saat ini sekitar 25,6 juta orang.

Tae-young (2021: 198) juga menambahkan bahwa generasi *jangmadang* merupakan penduduk Korea Utara yang menghabiskan masa awal mudanya di tahun 1990-an atau 2000-an. Tiga pendapat inilah yang kemudian menjadi acuan penulis dalam mendefinisikan penggunaan istilah generasi *jangmadang* dalam penelitian ini, yakni kelompok muda Korea Utara berusia 35 tahun atau lebih muda, yang tumbuh dan berperan dalam aktivitas *jangmadang*, dan dengan jumlahnya mampu memberikan

⁷ Perkiraan usia tersebut didasarkan pada kondisi kekurangan pangan yang sebenarnya mulai terjadi sejak akhir 1980-an, sebelum akhirnya membawa stagnansi ekonomi dan bencana kelaparan nasional pada tahun 1990-an (Soo-bin, 2003: 2).

implikasi tersendiri bagi ketahanan rezim Kim Jong-un melalui aksi kapitalis dan dampak yang dihasilkan dari konsumsi informasi dan media asing secara ilegal.

1.6.1.2 Ideologi *Juche*

Juche merupakan ideologi resmi Korea Utara yang dikembangkan oleh Kim il-sung sejak tahun 1950-an. Sejak awal pengenalanya, kekuatan implementasi dari ideologi tersebut didasarkan pada tiga nilai utama, yakni upaya kemandirian (ekonomi, politik, dan keamanan-militer), nasionalisme xenophobia, dan kultus *suryong* – pemimpin abadi ‘dinasti’ Kim (Junhyoung, 2019: 5). Sebagai negara otoriter⁸, *Juche* merupakan ideologi yang sengaja dibentuk untuk menunjukkan adanya legitimasi masyarakat terhadap rezim Kim. Dengan kata lain, ketaatan dan dukungan masyarakat terhadap tiga nilai utama *Juche* merupakan sumber utama bagi legitimasi rezim Kim di Korea Utara. Itulah mengapa, dalam penelitian ini tiga nilai *Juche* tersebut dijadikan dasar penilaian bagi adanya isu legitimasi rezim Kim Jong-un yang diakibatkan oleh generasi *jangmadang*

1.6.1.3 Aktivitas Kapitalis

Menurut Cambridge Dictionary (t.t.), kapitalis merupakan orang yang mendukung kapitalisme dan memiliki modal untuk diinvestasikan dalam suatu usaha. Sehingga

⁸ Negara otoriter adalah negara yang sistem politiknya memusatkan kekuasaan di tangan seorang pemimpin atau elit kecil, yang menjalankan kekuasaan dengan sewenang-wenang tanpa memperhatikan badan hukum yang ada, dan biasanya tidak dapat digantikan oleh warga negara melalui pemilihan yang bebas dan adil – partai politik oposisi terbatas atau bahkan tidak ada, sehingga sangat kontras dengan sistem demokrasi (Britannica, 2017).

aktivitas kapitalis adalah aksi yang dilakukan oleh kapitalis untuk mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya dalam mendukung perannya di sistem kapitalisme⁹. Kapitalisme sendiri merupakan suatu sistem ekonomi yang menitikberatkan pada hak privat terhadap alat produksi dan distribusi, yang digunakan untuk mencapai keuntungan maksimal dalam kondisi yang sangat kompetitif dan berfokus pada pasar – biasanya dikaitkan dengan pasar bebas ¹⁰(Spencer, 1990 dalam Agustiaty, 2009: 154). Kapitalisme ini kemudian sering dibandingkan dengan sistem ekonomi sosialis atau dikenal juga dengan ekonomi terencana, yakni sistem ekonomi di mana pemerintah mengatur semua aktivitas perekonomian, baik produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa, serta alokasi sumber daya (Dagger & Ball, 2021).

Dalam penelitian ini, aktivitas kapitalis digunakan untuk menunjukkan perilaku generasi *jangmadang* yang berfokus pada upaya akumulasi keuntungan secara individual, melalui sektor ekonomi privat yang muncul seiring dengan perkembangan pasar *jangmadang*. Sifat kapitalis dari generasi *jangmadang* juga dapat dilihat dari kesetujuan mereka terhadap penggunaan uang sebagai alat ukur kesuksesan seseorang

⁹ Teori kapitalis adalah untuk mendapat keuntungan maksimal melalui sumber daya yang minimal (Idris, 2021).

¹⁰ Dalam sistem kapitalis ini, kebebasan dan keadilan merupakan dua hal yang sangat dijunjung dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi. Kebebasan mengacu pada kesempatan dan keleluasaan yang diberikan kepada setiap pelaku ekonomi untuk berusaha memenuhi kepentingan ekonominya dengan campur tangan pemerintah yang sangat minim. Sedangkan keadilan mengacu pada kesesuaian imbalan yang harus diterima oleh setiap pelaku ekonomi berdasarkan prestasi kerja yang mereka berikan (Dagger & Ball, 2021).

yang mampu menempatkan generasi muda Korea Utara di tingkat kapitalis yang lebih tinggi daripada Amerika dan Korea Selatan (Schwekendiek & Sijia, 2020: 142).

1.6.1.4 Informasi dan Media Asing

Kata asing dapat didefinisikan sebagai kepemilikan atau keterkaitan terhadap negara yang bukan milik kita (Cambridge Dictionary, t.t.). Sedangkan informasi merupakan pengetahuan mengenai sesuatu yang kemudian disampaikan melalui perantara yang disebut dengan media, seperti buku, video, gambar, grafik, televisi, dan lain sebagainya (Briggs, dalam Tysara, 2021). Dalam penelitian ini, informasi dan media asing digunakan untuk menunjukkan pengetahuan dan produk media, seperti film, musik, siaran radio, dan lain sebagainya, yang diselundupkan secara ilegal dari luar Korea Utara. Salah satu informasi dan media asing yang populer dan berdampak besar bagi generasi *jangmadang* adalah musik dan drama dari Korea Selatan yang dikenal dengan K-pop dan K-drama (Yeung & Seo, 2021).

1.6.2 Tipe Penelitian

Tulisan ini menggunakan tipe penelitian eksplanatif karena bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis implikasi atau keterlibatan generasi *jangmadang* terhadap munculnya isu legitimasi bagi ketahanan rezim Kim Jong-un. Hal ini didukung oleh pendapat Singarimbun dan Effendi (2006), yang menjelaskan bahwa tipe penelitian eksplanatif merupakan tipe penelitian yang berupaya untuk

menjelaskan hubungan dari fenomena tertentu, yang didasarkan pada pengujian argumen atau hipotesis yang telah dibuat.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam tulisan ini adalah teknik studi pustaka. Teknik ini dilakukan melalui pengambilan data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, arsip, laporan, makalah yang diterbitkan, hasil riset sebelumnya, dan berbagai sumber kredibel lain yang sesuai dengan topik penelitian (Dey, 1993).

1.6.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam tulisan ini adalah teknik analisis kualitatif. Menurut Flick (2013: 5), teknik analisis kualitatif dilakukan dengan mengartikulasikan dan mengklasifikasikan data untuk memahami suatu fenomena yang sedang diteliti. Teknik ini juga melibatkan upaya pemeriksaan silang berbagai sumber data dan prosedur pengumpulan untuk mengevaluasi sejauh mana semua bukti telah terkonvergensi dengan baik. Tujuan dari teknik analisis data kualitatif ini adalah untuk mencapai pernyataan yang dapat digeneralisasikan dengan membandingkan berbagai data berupa dokumen, teks, atau beberapa kasus, sehingga penjelasan yang diperoleh dapat menjadi lebih rinci.

1.6.5 Rentang Waktu Penelitian

Rentang waktu penelitian ini adalah sejak rezim Kim Jong-un mulai berkuasa secara resmi pada tanggal 28 Desember 2011 dan berlangsung hingga saat ini. Hal ini dikarenakan, penulis berfokus pada kondisi dan prospek ketahanan rezim Kim Jong-un di tengah keberadaan generasi *jangmadang*. Melalui pengalaman kapitalis dan konsumsi media asing yang mereka miliki, generasi *jangmadang* mampu menimbulkan perubahan pola pikir terbesar terhadap pemerintah dan negara yang tidak pernah terjadi di generasi sebelumnya (Lu, 2019). Perubahan inilah yang kemudian mulai mengikis legitimasi Kim Jong-un dari penerapan ideologi *Juche* dan berpotensi menjadi ancaman besar bagi ketahanan rezim ‘dinasti’ Kim di masa depan.

1.6.6 Sistematika Pembahasan

Bab I : Pembahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, argumentasi penelitian, dan metodologi penelitian

Bab II : Pembahasan mengenai keterkaitan generasi *jangmadang* dengan aksi kapitalis dan akses informasi ataupun media asing

Bab III : Pembahasan mengenai pengaruh aktivitas kapitalis dan konsumsi informasi ataupun media asing generasi *jangmadang* terhadap legitimasi rezim Kim Jong-un

Bab IV : Pembahasan mengenai respons Kim Jong-un dalam mempertahankan rezim di tengah pengaruh generasi *jangmadang*

Bab V : Kesimpulan